

DETERMINAN PENCEGAHAN KECURANGAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Oleh:

Rahmat Kurniadi¹, Rama Gita Suci², Annie Mustika Putri³

Universitas Muhammadiyah Riau

Jl. KH. Ahmad Dahlan 88, Pekanbaru – Riau.

rahmatkurniadi161@gmail.com

Sejarah Artikel: Diterima Agustus 2022, Disetujui September 2022, Dipublikasikan November 2022

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang telah bekerja diatas 5 tahun. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan menggunakan kuesioner. Dalam penelitian ini sampel berjumlah 116 responden yang dipilih menggunakan purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah SPSS 2.6. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, dan Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, Budaya Organisasi, Pencegahan Kecurangan

ABSTRAK

This research is a quantitative research. This study aims to examine the effect of the internal control system, whistleblowing system, and organizational culture on fraud prevention. The sample in this study were civil servants (PNS) at the Pekanbaru City Regional Revenue Agency who had worked for more than 5 years. This study uses primary data collected using a questionnaire. In this study a sample of 116 respondents were selected using purposive sampling. The analytical tool used is SPSS 2.6. Based on the results of data analysis shows that the Internal Control System, Whistleblowing System, and Organizational Culture have a significant effect on fraud prevention.

Keywords: Internal Control System, Whistleblowing System, Organizational Culture, Fraud Prevention.

PENDAHULUAN

Kecurangan/*fraud* merupakan tindakan tidak jujur yang dapat menyebabkan potensi kerugian nyata terhadap pemerintah, perusahaan atau karyawan perusahaan atau orang lain tetapi tidak sebatas pada korupsi, pencurian uang, pencurian barang, penipuan, pemalsuan juga termasuk dalam perbuatan ini adalah pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan, atau menggunakan dokumen palsu untuk keperluan bisnis, atau membocorkan informasi perusahaan kepada pihak eksternal perusahaan. Kecurangan seperti ini biasanya dilakukan oleh karyawan

atau oknum di dalam pemerintah, perusahaan atau organisasi (Nugroho, 2015).

Kecurangan/*fraud* yang terjadi di lingkungan pemerintah masih sering terjadi dan terkadang sulit untuk diatasi. Kecurangan biasanya tidak hanya dilakukan oleh pegawai tingkat bawah, tetapi juga dilakukan oleh pimpinan suatu instansi, baik secara individual ataupun secara bersama sama. Kecurangan mencakup perbuatan melanggar hukum dan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang undangan lainnya yang dilakukan dengan niat untuk berbuat curang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja demi keuntungan

atau kerugian suatu instansi oleh orang dalam atau juga oleh orang diluar organisasi tersebut (Sigiro, 2019).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) adalah organisasi atau instansi yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah, pengoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapenda juga merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan serta tugas pembantuan.

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) telah mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan secara baik dan benar (Wardana, 2017). Hal tersebut dikarenakan banyaknya tindakan kecurangan yang terjadi di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut *Association of Certified Fraud Examinations* (ACFE) dalam (Amrizal, 2004) terdapat tiga jenis kecurangan yaitu kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi.

Salah satu kasus dugaan kecurangan terjadi pada Bapenda kota Pekanbaru terkait kasus upah pungut atau pencairan dana insentif sebesar Rp 1,3 miliar yang dilakukan pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru bersama stafnya, akhirnya menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Temuan tersebut berdasarkan hasil laporan hasil pemeriksaan BPK RI tertanggal 29 Juni 2020, ditemukan kertas kerja penghitungan dan bukti pertanggungjawaban realisasi insentif pajak daerah tahun 2019, terdapat kelebihan pembayaran insentif yang melebihi ketentuan sebanyak Rp. 1.791.945.609,00.

Beredarnya data soal upah pungut atau pencairan insentif bagi pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru dan stafnya itu, Dimana Kepala Bapenda Pekanbaru, memerintahkan para pejabatnya dan staf untuk menarik uang yang telah masuk ke rekening dengan jumlah besaran beragam. Informasi tersebut memastikan bahwa bukti itu, dapat di cek pada masing-masing rekening 28 pejabat dan stafnya. Selanjutnya, uang itu

disetorkan para Kepala Bidang (Kabid) dan Sekretaris Bapenda, yang selanjutnya diberikan kepada kepala Bapenda Pekanbaru total Rp1,3 miliar. Kejaksaan Negeri Pekanbaru lewat seksi tindak pidana khusus (kasipidsus) sempat mengendus dugaan korupsi upah pungut tersebut pada pertengahan Januari 2020 hingga akhir April 2020 lalu.

Terakhir laporan hasil pemeriksaan BPK RI tanggal 29 Juni 2020, ditemukan bahwa berdasarkan kertas kerja perhitungan dan bukti pertanggungjawaban realisasi insentif pajak daerah pada tahun 2019 terdapat kelebihan pembayaran insentif yang melebihi ketentuan sebanyak Rp. 1.791.945.609,00. Dimana pada data yang beredar, disebutkan nama-nama pejabat Bapenda Kota Pekanbaru ada sebanyak 28. Atas temuan itu, BPK RI memerintahkan, agar mengembalikan kelebihan bayar tersebut selama 60 hari kerja pasca laporan hasil pemeriksaan BPK RI diterbitkan tertanggal 29 Juni 2020 (amanahnews.com,2020).

Dari permasalahan diatas upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kecurangan / *fraud* yaitu dengan cara mengendalikan dengan menerapkan sistem pengendalian internal. *Comitte of Sponsoring Organization of the Treadway Commision* (COSO, 2013) mendefinisikan pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilaksanakan dewan direksi, manajemen dan personil pada organisasi, yang didesain buat menyediakan keyakinan berkaitan menggunakan keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap aturan dan efektifitas serta efisiensi operasi. Suatu organisasi membangun sistem pengendalian internal buat mengawasi guna mencegah terjadinya kecurangan. Penerapan pengendalian internal oleh suatu organisasi pula dimaksudkan buat mencapai tujuan pengendalian. Selain itu menurut (Sujana, 2020) semakin kuat sistem pengendalian internal di pemerintah daerah maka segala bentuk tindakan kecurangan dapat diminimalkan begitupun sebaliknya.

Penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan yang dilakukan oleh (Islamiyah, 2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana. Hasil penelitian (Romadaniati, 2020), (Sujana, 2020), serta (Ariastuti, 2020) juga menunjukkan adanya

pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Sedangkan penelitian (Eldayanti, 2020) serta (Kusumasari, 2020) menunjukkan variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Selain itu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya tindakan kecurangan yaitu dengan penerapan *whistleblowing system*. *Whistleblowing* adalah pelaporan apabila adanya perilaku yang tidak etis maupun tidak bermoral atau perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi atau karyawan dalam suatu organisasi, sehingga hal tersebut dapat merugikan organisasi atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Adanya *whistleblowing system* memberikan kesempatan bagi seorang *whistleblower* untuk melaporkan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan pihak internal organisasi. Dan adanya *whistleblowing system* menjadikan masyarakat lebih mudah dalam melaporkan tindak kecurangan / *fraud* tanpa adanya kekhawatiran karena kerahasiaan data terjamin dan diharapkan banyak masyarakat yang melaporkan tindakan kecurangan sehingga dapat mencegah dan memutus mata rantai kecurangan (Musmulyadi, 2020). Tujuan dilakukannya *whistleblowing* adalah untuk melaporkan atau mengungkap tindakan yang diduga dapat merugikan suatu organisasi dan mencegah terjadinya tindakan kecurangan yang mungkin terjadi.

Penelitian mengenai pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan yang dilakukan oleh (Pamungkas, 2020) menunjukkan *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Hasil penelitian (Darwis, 2020), (Suardana, 2019), (Romadaniati, 2020) juga menunjukkan *whistleblowing system* memiliki pengaruh dalam pencegahan kecurangan. Selain itu (Hariawan, 2020) juga menyatakan *whistleblowing system* memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Namun berbeda dengan hasil tersebut penelitian (Sujana, 2020) menunjukkan *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Selain *whistleblowing system* adanya budaya organisasi yang baik juga sangat berpengaruh dan sangat penting dalam mencegah dan mengatasi terjadinya tindakan kecurangan. Budaya organisasi yaitu norma-

norma, nilai, atau kebiasaan yang diterapkan di dalam suatu organisasi dan disetujui oleh semua anggota organisasi tersebut yang digunakan sebagai panduan setiap melakukan aktivitas baik untuk semua anggota organisasi maupun pihak lain. Pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan meningkatkan budaya organisasi melalui penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Apabila budaya organisasi baik maka akan meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan (Widiyarta, 2018). Tetapi apabila budaya organisasi tersebut buruk maka tingkat terjadinya kecurangan akan semakin banyak. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya budaya organisasi memberikan hasil bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Hasil tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Anita, 2015), dan (Widiyarta, 2018), yang menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh yang positif untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Pada dasarnya kecurangan / *fraud* disebabkan oleh tiga hal yaitu dorongan, peluang, dan rasionalisasi. Ketiga penyebab ini disebut dengan segitiga kecurangan / *fraud*. Dorongan tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan karena sifatnya tidak berhubungan langsung dengan perusahaan itu sendiri, misalnya dorongan karena kesulitan ekonomi. Di sisi lain, perusahaan dapat mengendalikan peluang dan rasionalisasi secara langsung, tanpa adanya peluang, meskipun terdapat dorongan dan rasionalisasi, maka kecurangan tidak dapat terjadi. Peluang dapat dikendalikan menggunakan sistem pengendalian internal dan juga *whistleblowing system* dan rasionalisasi dapat dikendalikan menggunakan budaya organisasi (Cressey, 1953).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen, yaitu Sistem Pengendalian Internal, *Whistleblowing system*, dan Budaya Organisasi terhadap variabel dependen, yaitu Pencegahan Kecurangan. Dalam penelitian ini populasi yang dipilih adalah seluruh pegawai yang bekerja di Bapenda Kota Pekanbaru yaitu 128 orang. teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan cara *Purposive*

Sampling. Purposive Sampling yaitu pengambilan sampel sesuai dengan kriteria tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah bekerja diatas 5 tahun yang berjumlah 116 orang.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, di mana pengolahannya menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis regresi linear berganda mendeteksi pengaruh dua atau lebih variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat). Peneliti menggunakan program SPSS versi 26.0 (*Statistical Product and Service Solutions*) untuk melakukan

perhitungan, pengolahan dan analisa untuk meregresikan model yang telah dirumuskan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linear berganda adalah analisis yang dilakukan untuk penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel dalam penelitiannya dan digunakan mengukur pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini analisis regresi linear berganda menggunakan program SPSS versi 2.6. Hasil pengujian analisis regresi linear berganda dapat dilihat dalam tabel 1 berikut :

Tabel 1:
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	.225	1.496	
	Sistem Pengendalian Internal	.160	.033	.354
	Whistleblowing System	.061	.021	.214
	Budaya Organisasi	.208	.031	.455

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 0,225 + 0,160X_1 + 0,061X_2 + 0,208X_3 + e$$

Keterangan :

1. Nilai konstanta (a) sebesar 0,225 memiliki arti jika variabel independen diasumsikan nol (0) maka variabel pencegahan kecurangan yang merupakan variabel dependen memiliki nilai sebesar 0,225.
2. Nilai koefisien untuk variabel sistem pengendalian internal (X1) adalah sebesar 0,160. hal ini berarti setiap peningkatan variabel sistem pengendalian internal (X1) sebesar 1 satuan maka terjadi penurunan variabel pencegahan kecurangan (Y) sebesar 0,160 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
3. Nilai koefisien untuk variabel *whistleblowing system* (X2) adalah sebesar 0,061 hal ini berarti setiap peningkatan variabel *whistleblowing system* (X2) sebesar 1 satuan maka akan terjadi penurunan variabel pencegahan kecurangan (Y) sebesar 0,061 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
4. Nilai koefisien untuk variabel budaya organisasi (X3) adalah sebesar 0,208 hal ini berarti setiap peningkatan variabel budaya organisasi (X3) sebesar 1 satuan maka akan terjadi penurunan variabel pencegahan kecurangan (Y) sebesar 0,208 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Tabel 2:
Hasil Uji Parsial (T)

		Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics Tolerance	VIF
1	(Constant)	.225	1.496		.150	.881		
	Sistem Pengendalian Internal	.160	.033	.354	4.921	.000	.832	1.202
	Whistleblowing System	.061	.021	.214	2.915	.004	.797	1.254
	Budaya Organisasi	.208	.031	.455	6.653	.000	.917	1.090

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan

Dari tabel 4.18 diatas, terlihat bahwa hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung $> t$ tabel yaitu $4,921 > 1,660$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan, sehingga hipotesis pertama (H_1) **diterima**.

Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan

Dari tabel 4.18 diatas, terlihat bahwa hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung $> t$ tabel yaitu $2,915 > 1,660$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan, sehingga hipotesis kedua (H_2) **diterima**.

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan

Dari tabel 4.18 diatas, terlihat bahwa hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung $> t$ tabel yaitu $6,653 > 1,660$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan, sehingga hipotesis ketiga (H_3) **diterima**.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel-variabel yang mempengaruhi pencegahan kecurangan. Variabel-variabel yang diujikan dalam penelitian ini yaitu sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan budaya organisasi. Berdasarkan analisis dan pengujian data dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan, Artinya semakin baik sistem pengendalian internal disuatu instansi pemerintahan / perusahaan, maka semakin rendah tingkat terjadinya kecurangan.
2. *Whistleblowing System* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan artinya semakin baik *whistleblowing system* disuatu instansi pemerintahan / perusahaan, maka semakin rendah tingkat kecurangan terjadi.
3. Budaya Organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Artinya semakin baik budaya organisasi yang berada didalam instansi pemerintahan / perusahaan itu, maka semakin rendah tingkat kecurangan terjadi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, saran yang diberikan yaitu:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah sampel dengan memperluas area penelitian, sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat

menggambarkan keadaan yang lebih nyata.

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menambah variabel yang lain, guna mengetahui kemungkinan faktor-faktor lain juga dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam melakukan kecurangan.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah teknik wawancara agar hasil yang didapatkan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariastuti, N. M. M., W, R. D. A., & Yuliantari, N. P. Y. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada LPD Sekecamatan Denpasar Utara. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 798–824.
- Cressey, D. (1953). Other people's money, dalam: "Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99, Skousen et al. 2009. *Journal of Corporate Governance and Firm Performance*. Vol. 13 h. 53-81.
- Eldayanti, N. K. R., Indraswarawati, S. A. P. A., & Yuniasih, N. W. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas Dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahanl Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 465–494.
- Hariawan, I. M. H., Sumadi, N. K., & Erlinawati, N. W. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 586-618.
- <https://amanahnews.com/read/detail/65090>
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak (Studi Empiris Pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu Dan Desa Pato. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)* , 8(1), 1 – 13, e-ISSN : 2715-7016.
- Musmulyadi, M., & Sari, F. I. (2020). Whistleblowing System Dalam Memutus Rantai Fraud Untuk Mewujudkan Economic Growth (Studi Pada Direktorat Jenderal Pajak Indonesia). *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 292-303.
- Nugroho, V.O. 2015. Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud dengan Perilaku Etis sebagai Variabel Intervening pada PT. Pagilaran. Skripsi. Jurusan Pendidikan Akuntansi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pamungkas, I. D., Wahyudi, S., & Achmad, T. (2020). Whistleblowing system and fraud early warning system on village fund fraud : The indonesian experience. *International Journal of Environmental Science*, 5, 151–158, ISSN: 2367-8941.
- Romadaniati, Taufik, T., & Nasir, A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing system Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi. (Studi Pada Desa - Desa Di Kabupaten Bengkalis). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* , 4(3), 227–237, e-ISSN: 2685-5607.
- Sigiro, L. H. (2019). PENGARUH PERSEPSI PEGAWAI MENGENAI WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PADA INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI.
- Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S., & Laksmi, P. S. P. (2020). Whistleblowing System, Competence, Moralit y, and Internal Control System Against Fraud Prevention on Village Financial Management in Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2780–2794.
- Wardana, I Gede Adi Kusuma. 2017. Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System Dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Buleleng). Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha.

Widiyarta, K., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng). E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 8(2), 1–12.